



**BUPATI BARITO KUALA**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

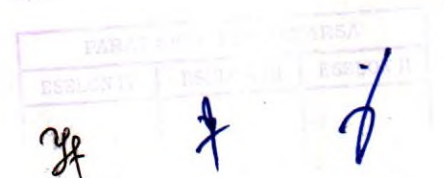
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

|                        |  |
|------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI       |  |
| KABUPATEN BARITO KUALA |  |

|                       |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| PARAF SKPD PEMRAKARSA |            |           |
| ESELON IV             | ESELON III | ESELON II |
|                       |            |           |



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia Nomor 6757);





10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

b.

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI |            |
| KELOMPOK IV                                                       | KELOMPOK V |
| 28                                                                | 7          |
|                                                                   | 6          |



19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala.

| PARAF RUMAH SAKIT |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| ESKON IV          | ESKON III | ESKON II |
| yl                | f         | j        |



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Barito Kuala.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi PKD adalah tim yang memfasilitasi pembinaan keuangan desa dari Tingkat Kecamatan.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
15. Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

PARAF KEPALA DAERAH  
 [Signature]

PARAF BPD PEMRAJAUSA

| ESELON IV   | ESELON III  | ESELON II   |
|-------------|-------------|-------------|
| [Signature] | [Signature] | [Signature] |



17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
18. Perlindungan Masyarakat/Pertahanan Sipil yang selanjutnya disebut Linmas/Hansip adalah satuan perlindungan masyarakat yang dilatih untuk menangani bencana dan menjaga keamanan masyarakat.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
20. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis atau khusus.

## BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan merupakan bagian dari APBDesa.

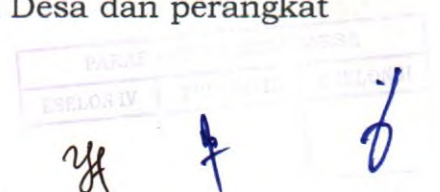
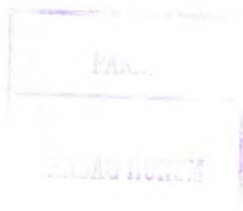
### Pasal 4

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 85.871.793.400,00 (*Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*).

## BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

### Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagi kepada 195 (Seratus sembilan puluh lima) Desa di Daerah dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;





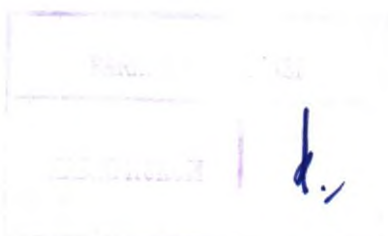
- b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Sanksi Kinerja.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan :
  - a. tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan dan jaminan sosial badan permusyawaratan Desa; dan
  - c. honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa
 untuk satu tahu anggaran.
- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (4) Alokasi kinerja perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan Dana Desa dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2025 serta memperhatikan Laporan Pertanggungjawaban Desa Tahun Anggaran 2025 bagi 3 (tiga) Desa sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*)
- (5) Besaran alokasi kinerja sebagaimana ayat (4) bagi 3 (tiga) Desa, sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) terdiri dari :
  - a. Terbaik Pertama sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
  - b. Terbaik Kedua sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  - c. Terbaik Ketiga sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- (6) Untuk dikaji kembali materi terkait pemberian sanksi kinerja berupa pengurangan ADD sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) bagi Desa terakhir dalam hal penyampaian pengajuan ADD Tahap III Tahun 2025.

#### Pasal 6

- (1) Besaran ADD dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADD_x = ADDBP_x + ADDP_x + ADDK_x$$

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| ADD <sub>x</sub>   | = Alokasi Dana Desa untuk Desa x                 |
| ADDBP <sub>x</sub> | = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x |
| ADDP <sub>x</sub>  | = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x    |
| ADDK <sub>x</sub>  | = Alokasi Dana Desa Kinerja untuk Desa x         |





- (2) Besaran ADD untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Staf Desa, dan Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{ADDP}_x = \frac{\text{BD}_x}{\sum \text{BD}} \times (\text{ADDP})$$

$\text{ADDP}_x$  = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x  
 $\text{BD}_x$  = Nilai Bobot Desa x  
 $\sum \text{BD}$  = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa  
 $\text{ADDP}$  = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{BD}_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + \dots + a_n.KV_n$$

$\text{BD}_x$  = Nilai Bobot Desa x  
 $a_1, a_2, \dots, a_n$  = Angka Bobot masing-masing Variabel  
 $KV$  = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

- (5) Penetapan Rincian ADD dan penghitungan pembagian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan ADD bagi setiap Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dianggarkan pada pendapatan APBDesa tahun 2025.
- (2) Penganggaran belanja yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Jika terjadi perubahan besaran ADD, maka APBDesa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN

#### Pasal 8

- (1) Prioritas ADD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Prioritas ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. Penerimaan lain-lain Kepala Desa yang sah;
  - c. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.





- d. Penerimaan lain-lain Perangkat Desa yang sah;
  - e. Honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa;
  - f. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - g. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
  - h. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPD;
  - i. Penyediaan operasional BPD;
  - j. Penyediaan Honorarium dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Staf Desa;
  - k. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - l. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Warga
  - m. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - n. Penyediaan insentif bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - o. Penyediaan Insentif bagi Limas/Hansip;
  - p. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Linmas/Hansip;
  - q. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Kesehatan Masyarakat;
  - r. Penyediaan Insentif bagi Pengurus Inti PKK;
  - s. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus Inti PKK;
  - t. Seleksi Perangkat Desa;
  - u. Dukungan Penyelenggaraan Lomba Desa;
  - v. Penyediaan Operasional Kegiatan Batas Desa;
  - w. Dukungan Pengamanan Batas Desa Dengan Pembuatan Pilar Batas Desa;
  - x. Penyediaan Operasional Pengamanan Aset Desa;
  - y. Jasa Sewa Server;
  - z. Dukungan Kegiatan Retret Bagi Kepala Desa
  - aa. Dukungan Bantuan Transport untuk 100 orang Masyarakat Desa dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala;
  - bb. Kegiatan pada sub bidang penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; dan
  - cc. Kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah desa.
- (3) Dalam hal ketersediaan ADD tidak mencukupi untuk mendanai penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/ Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan dan Jasa Sewa Server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y, dapat dipenuhi dari sumber dana selain Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada :
- a. bidang pembangunan desa;
  - b. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - c. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.





- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.

## BAB V TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank pemerintah terdekat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.

### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan menyampaikan :
  - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
  - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
  - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
  - f. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Tim PKD Kecamatan Tahap III Tahun 2025.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
  - b. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Tim PKD Kecamatan Tahap I Tahun 2026.





- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap III.
  - b. Laporan BUMDesa.
  - c. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Tim PKD Kecamatan Tahap II Tahun 2026.
- (4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
  - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
  - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
  - e. pakta integritas (bermaterai); dan
  - f. surat pernyataan penggunaan ADD

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
  - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan;
  - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD; dan
  - e. lembar Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim PKD Kecamatan.
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
  - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
  - b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
  - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
  - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
  - e. pakta integritas (bermaterai);
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
  - g. print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.

PASAL 13

KECAMATAN  
SESSION IV  
2026  
2026  
2026



BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

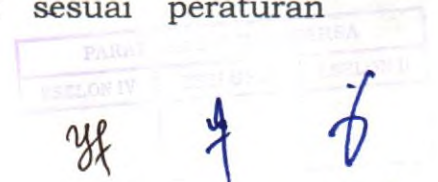
Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2025 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan.
  - c. Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Tim PKD Kecamatan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan paling lambat minggu kedua tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran ADD.
- (7) Tim Fasilitasi PKD Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap dilampiri laporan dari tingkat desa, dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
  - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - b. masalah yang dihadapi; dan
  - c. hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.





- b. pada organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan kas.
- c. diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh :
  - 1. Dinas PMD membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  - 2. Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - 3. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.
- (2) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Silpa ADD tersebut.
- (3) Apabila Desa tidak tepat waktu dalam pengajuan permohonan pencairan ADD, mempengaruhi perhitungan ADD untuk tahun Anggaran 2027.
- (4) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2025 dapat digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain RKD yang sudah dilaporkan ke Dinas PMD.
- (2) Kaur Keuangan memungut pajak Negara dan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan dan menyetorkan pungutan pajak negara ke kas negara dan pajak daerah ke kas daerah.

STAMP: KEMENTERIAN

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps: PALAP, KEMENTERIAN, and other official markings.



- (3) Penyimpanan uang tunai oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan paling lambat pada minggu keempat bulan Desember ke RKD.
- (4) Kegiatan pembangunan fisik desa setiap tahapan penyaluran ADD dilaksanakan foto kegiatan mulai 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen);
- (5) Kegiatan pembangunan fisik desa setiap tahapan penyaluran ADD dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi dari Tim PKD Kecamatan yang dimuat dalam Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi;
- (6) ADD tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain;
- (7) ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD dapat dikenakan Sanksi dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2026.
- (3) Pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2026. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan.
  - b. mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - c. mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas PMD.
  - d. pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
  - e. pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat.

#### Pasal 19

Format kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan surat pertanggungjawaban Desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya, surat pengantar dari Desa ke Dinas PMD, surat permohonan pencairan ADD, kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan, surat pernyataan penggunaan ADD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

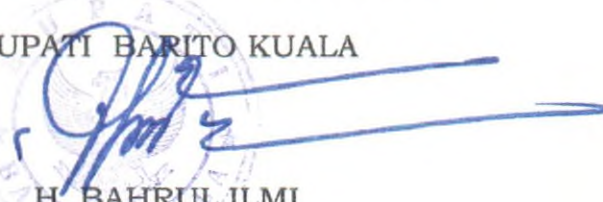
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI BARITO KUALA

  
H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

  
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 5



PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | KECAMATAN   | DESA                    | JUMLAH ADD  | TAHAP I     | TAHAP II    | TAHAP III   |
|----|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |             |                         |             | 30%         | 40%         | 30%         |
| 1  | TABUNGANEN  | KUALA LUPAK             | 433.291.000 | 129.987.300 | 173.316.400 | 129.987.300 |
| 2  | TABUNGANEN  | SUNGAI TELAN BESAR      | 427.093.000 | 128.127.900 | 170.837.200 | 128.127.900 |
| 3  | TABUNGANEN  | SUNGAI TELAN KECIL      | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 4  | TABUNGANEN  | TABUNGANEN MUARA        | 423.993.000 | 127.197.900 | 169.597.200 | 127.197.900 |
| 5  | TABUNGANEN  | TABUNGANEN TENGAH       | 423.993.000 | 127.197.900 | 169.597.200 | 127.197.900 |
| 6  | TABUNGANEN  | KARYA BARU              | 423.993.000 | 127.197.900 | 169.597.200 | 127.197.900 |
| 7  | TABUNGANEN  | TABUNGANEN PEMURUS      | 540.545.000 | 162.163.500 | 216.218.000 | 162.163.500 |
| 8  | TABUNGANEN  | SUNGAI TERAS DALAM      | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 9  | TABUNGANEN  | SUNGAI JINGAH BESAR     | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 10 | TABUNGANEN  | TABUNGANEN KECIL        | 488.781.000 | 146.634.300 | 195.512.400 | 146.634.300 |
| 11 | TABUNGANEN  | SEI TERAS LUAR          | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 12 | TABUNGANEN  | SEI TELAN MUARA         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 13 | TABUNGANEN  | BERINGIN KENCANA        | 423.993.000 | 127.197.900 | 169.597.200 | 127.197.900 |
| 14 | TABUNGANEN  | TANGGUL REJO            | 494.980.000 | 148.494.000 | 197.992.000 | 148.494.000 |
| 15 | TAMBAN      | PURWOSARI II            | 491.881.000 | 147.564.300 | 196.752.400 | 147.564.300 |
| 16 | TAMBAN      | PURWOSARI I             | 514.663.000 | 154.398.900 | 205.865.200 | 154.398.900 |
| 17 | TAMBAN      | TAMBAN BANGUN           | 440.576.000 | 132.172.800 | 176.230.400 | 132.172.800 |
| 18 | TAMBAN      | TAMBAN MUARA            | 494.980.000 | 148.494.000 | 197.992.000 | 148.494.000 |
| 19 | TAMBAN      | TAMBAN KECIL            | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 20 | TAMBAN      | TINGGIRAN II LUAR       | 540.545.000 | 162.163.500 | 216.218.000 | 162.163.500 |
| 21 | TAMBAN      | JELAPAT I               | 540.545.000 | 162.163.500 | 216.218.000 | 162.163.500 |
| 22 | TAMBAN      | TAMBAN MUARA BARU       | 427.093.000 | 128.127.900 | 170.837.200 | 128.127.900 |
| 23 | TAMBAN      | PURWOSARI BARU          | 517.763.000 | 155.328.900 | 207.105.200 | 155.328.900 |
| 24 | TAMBAN      | SEKATA BARU             | 427.093.000 | 128.127.900 | 170.837.200 | 128.127.900 |
| 25 | TAMBAN      | KOANDA                  | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 26 | TAMBAN      | DAMSARI                 | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 27 | TAMBAN      | SIDOREJO                | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 28 | TAMBAN      | JELAPAT BARU            | 517.763.000 | 155.328.900 | 207.105.200 | 155.328.900 |
| 29 | TAMBAN      | TAMBAN BANGUN BARU      | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 30 | TAMBAN      | TAMBAN SARI BARU        | 491.881.000 | 147.564.300 | 196.752.400 | 147.564.300 |
| 31 | ANJIR PASAR | ANDAMAN                 | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 32 | ANJIR PASAR | HILIR MESJID            | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 33 | ANJIR PASAR | ANJIR PASAR KOTA        | 491.881.000 | 147.564.300 | 196.752.400 | 147.564.300 |
| 34 | ANJIR PASAR | BANYIUR                 | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 35 | ANJIR PASAR | GANDARAYA               | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 36 | ANJIR PASAR | GANDARIA                | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 37 | ANJIR PASAR | ANJIR PASAR KOTA II     | 511.564.000 | 153.469.200 | 204.625.600 | 153.469.200 |
| 38 | ANJIR PASAR | ANDAMAN II              | 614.695.000 | 184.408.500 | 245.878.000 | 184.408.500 |
| 39 | ANJIR PASAR | ANJIR SEBERANG PASAR II | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 40 | ANJIR PASAR | ANJIR SEBERANG PASAR I  | 392.794.000 | 117.838.200 | 157.117.600 | 117.838.200 |
| 41 | ANJIR PASAR | ANJIR PASAR LAMA        | 517.763.000 | 155.328.900 | 207.105.200 | 155.328.900 |
| 42 | ANJIR PASAR | PANDAN SARI             | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 43 | ANJIR PASAR | MENTAREN                | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 44 | ANJIR PASAR | BARUNAI BARU            | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 45 | ANJIR PASAR | DANAU KARYA             | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 46 | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT MUARA     | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 47 | ANJIR MUARA | ANJIR MUARA KOTA        | 514.663.000 | 154.398.900 | 205.865.200 | 154.398.900 |



**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO  | KECAMATAN     | DESA                    | JUMLAH ADD  | TAHAP I     | TAHAP II    | TAHAP III   |
|-----|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |               |                         |             | 30%         | 40%         | 30%         |
| 48  | ANJIR MUARA   | PATIH MUHUR             | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 49  | ANJIR MUARA   | ANJIR MUARA KOTA TENGAH | 511.564.000 | 153.469.200 | 204.625.600 | 153.469.200 |
| 50  | ANJIR MUARA   | ANJIR SERAPAT LAMA      | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 51  | ANJIR MUARA   | ANJIR SERAPAT BARU      | 423.993.000 | 127.197.900 | 169.597.200 | 127.197.900 |
| 52  | ANJIR MUARA   | ANJIR MUARA LAMA        | 494.980.000 | 148.494.000 | 197.992.000 | 148.494.000 |
| 53  | ANJIR MUARA   | SUNGAI PUNGGU           | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 54  | ANJIR MUARA   | ANJIR SERAPAT BARU I    | 398.993.000 | 119.697.900 | 159.597.200 | 119.697.900 |
| 55  | ANJIR MUARA   | PATIH MUHUR BARU        | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 56  | ANJIR MUARA   | SEI PUNGGU BARU         | 392.794.000 | 117.838.200 | 157.117.600 | 117.838.200 |
| 57  | ANJIR MUARA   | ANJIR SERAPAT MUARA I   | 440.576.000 | 132.172.800 | 176.230.400 | 132.172.800 |
| 58  | ANJIR MUARA   | SEPAKAT BARSAMA         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 59  | ANJIR MUARA   | MARABAHAN BARU          | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 60  | ANJIR MUARA   | BERINGIN JAYA           | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 61  | ALALAK        | PULAU ALALAK            | 463.359.000 | 139.007.700 | 185.343.600 | 139.007.700 |
| 62  | ALALAK        | PULAU SEWANGI           | 443.676.000 | 133.102.800 | 177.470.400 | 133.102.800 |
| 63  | ALALAK        | PULAU SUGARA            | 440.576.000 | 132.172.800 | 176.230.400 | 132.172.800 |
| 64  | ALALAK        | SUNGAI LUMBAH           | 514.663.000 | 154.398.900 | 205.865.200 | 154.398.900 |
| 65  | ALALAK        | BERANGAS TIMUR          | 537.445.000 | 161.233.500 | 214.978.000 | 161.233.500 |
| 66  | ALALAK        | SEI SEMANGAT BHAKTI     | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 67  | ALALAK        | SUNGAI PITUNG           | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 68  | ALALAK        | BELANDEAN MUARA         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 69  | ALALAK        | BELANDEAN               | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 70  | ALALAK        | TANJUNG HARAPAN         | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 71  | ALALAK        | SEMANGAT DALAM          | 537.445.000 | 161.233.500 | 214.978.000 | 161.233.500 |
| 72  | ALALAK        | BERINGIN                | 534.346.000 | 160.303.800 | 213.738.400 | 160.303.800 |
| 73  | ALALAK        | SEMANGAT KARYA          | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 74  | ALALAK        | PANCA KARYA             | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 75  | ALALAK        | TATAH MESJID            | 460.259.000 | 138.077.700 | 184.103.600 | 138.077.700 |
| 76  | MANDASTANA    | TERANTANG               | 437.477.000 | 131.243.100 | 174.990.800 | 131.243.100 |
| 77  | MANDASTANA    | TANIPAH                 | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 78  | MANDASTANA    | PUNTIK LUAR             | 720.894.000 | 216.268.200 | 288.357.600 | 216.268.200 |
| 79  | MANDASTANA    | PUNTIK DALAM            | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 80  | MANDASTANA    | TABING RIMBAH           | 514.663.000 | 154.398.900 | 205.865.200 | 154.398.900 |
| 81  | MANDASTANA    | PANTAI HAMBAWANG        | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 82  | MANDASTANA    | TATAH ALAYUNG           | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 83  | MANDASTANA    | PUNTIK TENGAH           | 494.980.000 | 148.494.000 | 197.992.000 | 148.494.000 |
| 84  | MANDASTANA    | LOKRAWA                 | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 85  | MANDASTANA    | SEI RAMANIA             | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 86  | MANDASTANA    | BANGKIT BARU            | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 87  | MANDASTANA    | ANTASAN SEGERA          | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 88  | MANDASTANA    | KARANG BUNGA            | 437.477.000 | 131.243.100 | 174.990.800 | 131.243.100 |
| 89  | MANDASTANA    | KARANG INDAH            | 488.781.000 | 146.634.300 | 195.512.400 | 146.634.300 |
| 90  | RANTAU BADAUH | SUNGAI PANTAI           | 511.564.000 | 153.469.200 | 204.625.600 | 153.469.200 |
| 91  | RANTAU BADAUH | PINDAHAN BARU           | 491.881.000 | 147.564.300 | 196.752.400 | 147.564.300 |
| 92  | RANTAU BADAUH | SUNGAI GAMPA ASAHI      | 491.881.000 | 147.564.300 | 196.752.400 | 147.564.300 |
| 93  | RANTAU BADAUH | SUNGAI GAMPA            | 508.464.000 | 152.539.200 | 203.385.600 | 152.539.200 |
| 94  | RANTAU BADAUH | SUNGAI SAHURAI          | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 95  | RANTAU BADAUH | SIMPANG ARJA            | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 96  | RANTAU BADAUH | SINAR BARU              | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 97  | RANTAU BADAUH | SUNGAI BAMBAN           | 488.781.000 | 146.634.300 | 195.512.400 | 146.634.300 |
| 98  | RANTAU BADAUH | DANDA JAYA              | 534.346.000 | 160.303.800 | 213.738.400 | 160.303.800 |
| 99  | BELAWANG      | MURUNG KERAMAT          | 386.595.000 | 115.978.500 | 154.638.000 | 115.978.500 |
| 100 | BELAWANG      | SUNGAI SELUANG          | 386.595.000 | 115.978.500 | 154.638.000 | 115.978.500 |



PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA  
 TAHUN ANGGARAN 2026

| NO  | KECAMATAN | DESA                 | JUMLAH ADD  | TAHAP I     | TAHAP II    | TAHAP III   |
|-----|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |           |                      |             | 30%         | 40%         | 30%         |
| 101 | BELAWANG  | BELAWANG             | 488.781.000 | 146.634.300 | 195.512.400 | 146.634.300 |
| 102 | BELAWANG  | BAMBANGIN            | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 103 | BELAWANG  | SUKARAMAI            | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 104 | BELAWANG  | SUNGAI SELUANG PASAR | 488.781.000 | 146.634.300 | 195.512.400 | 146.634.300 |
| 105 | BELAWANG  | SAMUDA               | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 106 | BELAWANG  | PARIMATA             | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 107 | BELAWANG  | KARANG DUKUH         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 108 | BELAWANG  | PATIH SELERA         | 395.894.000 | 118.768.200 | 158.357.600 | 118.768.200 |
| 109 | BELAWANG  | KARANG BUAH          | 386.595.000 | 115.978.500 | 154.638.000 | 115.978.500 |
| 110 | BELAWANG  | BINAAN BARU          | 392.794.000 | 117.838.200 | 157.117.600 | 117.838.200 |
| 111 | BELAWANG  | RANGGA SURYA         | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 112 | CERBON    | SUNGAI KAMBAT        | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 113 | CERBON    | SUNGAI RASAU         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 114 | CERBON    | SIMPANG NUNGKI       | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 115 | CERBON    | SAWAHAN              | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 116 | CERBON    | BANTUIL              | 511.564.000 | 153.469.200 | 204.625.600 | 153.469.200 |
| 117 | CERBON    | BADANDAN             | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 118 | CERBON    | SEI TUNJANG          | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 119 | CERBON    | SEI RAYA             | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 120 | BAKUMPAI  | BANUA ANYAR          | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 121 | BAKUMPAI  | MURUNG RAYA          | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 122 | BAKUMPAI  | PALINGKAU            | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 123 | BAKUMPAI  | BALUKUNG             | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 124 | BAKUMPAI  | BANITAN              | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 125 | BAKUMPAI  | BATIK                | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 126 | BAKUMPAI  | BAHALAYUNG           | 408.496.000 | 122.548.800 | 163.398.400 | 122.548.800 |
| 127 | BAKUMPAI  | SUNGAI SELIRIK       | 408.496.000 | 122.548.800 | 163.398.400 | 122.548.800 |
| 128 | KURIPAN   | JAMBU BARU           | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 129 | KURIPAN   | JAMBU                | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 130 | KURIPAN   | KABUAU               | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 131 | KURIPAN   | JARENANG             | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 132 | KURIPAN   | TABATAN              | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 133 | KURIPAN   | KURIPAN              | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 134 | KURIPAN   | TABATAN BARU         | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 135 | KURIPAN   | ASIA BARU            | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 136 | KURIPAN   | RIMBUN TULANG        | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 137 | TABUKAN   | PANTANG RAYA         | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 138 | TABUKAN   | TABUKAN RAYA         | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 139 | TABUKAN   | TELUK TAMBA          | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 140 | TABUKAN   | RANTAU BAMBAN        | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 141 | TABUKAN   | TAMBA JAYA           | 389.695.000 | 116.908.500 | 155.878.000 | 116.908.500 |
| 142 | TABUKAN   | MUARA PULAU          | 395.894.000 | 118.768.200 | 158.357.600 | 118.768.200 |
| 143 | TABUKAN   | KARYA INDAH          | 411.595.000 | 123.478.500 | 164.638.000 | 123.478.500 |
| 144 | TABUKAN   | BANDAR KARYA         | 386.595.000 | 115.978.500 | 154.638.000 | 115.978.500 |
| 145 | TABUKAN   | KARYA MAKMUR         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 146 | TABUKAN   | KARYA JADI           | 420.894.000 | 126.268.200 | 168.357.600 | 126.268.200 |
| 147 | TABUKAN   | PANTANG BARU         | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |
| 148 | MEKARSARI | MEKARSARI            | 534.346.000 | 160.303.800 | 213.738.400 | 160.303.800 |
| 149 | MEKARSARI | TAMBAN RAYA          | 440.576.000 | 132.172.800 | 176.230.400 | 132.172.800 |
| 150 | MEKARSARI | TINGGIRAN TENGAH     | 417.794.000 | 125.338.200 | 167.117.600 | 125.338.200 |
| 151 | MEKARSARI | TINGGIRAN DARAT      | 443.676.000 | 133.102.800 | 177.470.400 | 133.102.800 |
| 152 | MEKARSARI | JELAPAT II           | 423.993.000 | 127.197.900 | 169.597.200 | 127.197.900 |
| 153 | MEKARSARI | TAMBAN RAYA BARU     | 414.695.000 | 124.408.500 | 165.878.000 | 124.408.500 |



**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO     | KECAMATAN | DESA                      | JUMLAH ADD     | TAHAP I        | TAHAP II       | TAHAP III      |
|--------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |           |                           |                | 30%            | 40%            | 30%            |
| 154    | MEKARSARI | TINGGIRAN BARU            | 466.458.000    | 139.937.400    | 186.583.200    | 139.937.400    |
| 155    | MEKARSARI | KARANG MEKAR              | 417.794.000    | 125.338.200    | 167.117.600    | 125.338.200    |
| 156    | MEKARSARI | INDAH SARI                | 411.595.000    | 123.478.500    | 164.638.000    | 123.478.500    |
| 157    | BARAMBAI  | BARAMBAI                  | 491.881.000    | 147.564.300    | 196.752.400    | 147.564.300    |
| 158    | BARAMBAI  | SUNGAI KALI               | 491.881.000    | 147.564.300    | 196.752.400    | 147.564.300    |
| 159    | BARAMBAI  | PENDALAMAN                | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 160    | BARAMBAI  | HANDIL BARABAI            | 408.496.000    | 122.548.800    | 163.398.400    | 122.548.800    |
| 161    | BARAMBAI  | BAGAGAP                   | 417.794.000    | 125.338.200    | 167.117.600    | 125.338.200    |
| 162    | BARAMBAI  | BARAMBAI KARYA TANI       | 420.894.000    | 126.268.200    | 168.357.600    | 126.268.200    |
| 163    | BARAMBAI  | PENDALAMAN BARU           | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 164    | BARAMBAI  | KARYA BARU                | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 165    | BARAMBAI  | BARAMBAI KOLAM KIRI       | 508.464.000    | 152.539.200    | 203.385.600    | 152.539.200    |
| 166    | BARAMBAI  | BARAMBAI KOLAM KANAN      | 417.794.000    | 125.338.200    | 167.117.600    | 125.338.200    |
| 167    | BARAMBAI  | BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM | 491.881.000    | 147.564.300    | 196.752.400    | 147.564.300    |
| 168    | MARABAHAN | PENGHULU                  | 485.682.000    | 145.704.600    | 194.272.800    | 145.704.600    |
| 169    | MARABAHAN | BAGUS                     | 485.682.000    | 145.704.600    | 194.272.800    | 145.704.600    |
| 170    | MARABAHAN | BALIUK                    | 405.396.000    | 121.618.800    | 162.158.400    | 121.618.800    |
| 171    | MARABAHAN | ANTAR BARU                | 395.894.000    | 118.768.200    | 158.357.600    | 118.768.200    |
| 172    | MARABAHAN | ANTAR JAYA                | 392.794.000    | 117.838.200    | 157.117.600    | 117.838.200    |
| 173    | MARABAHAN | ANTAR RAYA                | 466.881.000    | 140.064.300    | 186.752.400    | 140.064.300    |
| 174    | MARABAHAN | SIDO MAKMUR               | 383.496.000    | 115.048.800    | 153.398.400    | 115.048.800    |
| 175    | MARABAHAN | KARYA MAJU                | 408.496.000    | 122.548.800    | 163.398.400    | 122.548.800    |
| 176    | WANARAYA  | KOLAM KIRI                | 463.781.000    | 139.134.300    | 185.512.400    | 139.134.300    |
| 177    | WANARAYA  | ROHAM RAYA                | 498.080.000    | 149.424.000    | 199.232.000    | 149.424.000    |
| 178    | WANARAYA  | SIMPANG JAYA              | 488.781.000    | 146.634.300    | 195.512.400    | 146.634.300    |
| 179    | WANARAYA  | TUMIH                     | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 180    | WANARAYA  | PINANG HABANG             | 488.781.000    | 146.634.300    | 195.512.400    | 146.634.300    |
| 181    | WANARAYA  | WARINGIN KENCANA          | 411.595.000    | 123.478.500    | 164.638.000    | 123.478.500    |
| 182    | WANARAYA  | BABAT RAYA                | 411.595.000    | 123.478.500    | 164.638.000    | 123.478.500    |
| 183    | WANARAYA  | KOLAM KANAN               | 485.682.000    | 145.704.600    | 194.272.800    | 145.704.600    |
| 184    | WANARAYA  | SIDOMULYO                 | 491.881.000    | 147.564.300    | 196.752.400    | 147.564.300    |
| 185    | WANARAYA  | KOLAM MAKMUR              | 491.881.000    | 147.564.300    | 196.752.400    | 147.564.300    |
| 186    | WANARAYA  | SURYA KANTA               | 491.881.000    | 147.564.300    | 196.752.400    | 147.564.300    |
| 187    | WANARAYA  | SUMBER RAHAYU             | 588.781.000    | 176.634.300    | 235.512.400    | 176.634.300    |
| 188    | WANARAYA  | DWIPASARI                 | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 189    | JEJANGKIT | SAMPURNA                  | 389.695.000    | 116.908.500    | 155.878.000    | 116.908.500    |
| 190    | JEJANGKIT | JEJANGKIT BARAT           | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 191    | JEJANGKIT | BAHANDANG                 | 414.695.000    | 124.408.500    | 165.878.000    | 124.408.500    |
| 192    | JEJANGKIT | JEJANGKIT TIMUR           | 420.894.000    | 126.268.200    | 168.357.600    | 126.268.200    |
| 193    | JEJANGKIT | CAHAYA BARU               | 417.794.000    | 125.338.200    | 167.117.600    | 125.338.200    |
| 194    | JEJANGKIT | JEJANGKIT PASAR           | 417.794.000    | 125.338.200    | 167.117.600    | 125.338.200    |
| 195    | JEJANGKIT | JEJANGKIT MUARA           | 392.799.400    | 117.839.820    | 157.119.760    | 117.839.820    |
| JUMLAH |           |                           | 85.871.793.400 | 25.761.538.020 | 34.348.717.360 | 25.761.538.020 |

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

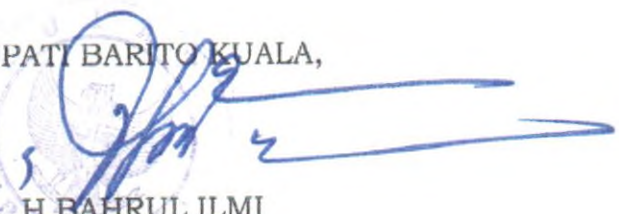


Lampiran II  
Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 5 Tahun 2026  
Tanggal 19 Februari 2026

**DESA YANG TERLAMBAT PENGAJUAN DANA DESA DAN ADD**

| NO | KECAMATAN   | DESA                   |
|----|-------------|------------------------|
| 1  | ANJIR PASAR | HILIR MESJID           |
| 2  | ANJIR PASAR | ANJIR SEBERANG PASAR I |
| 3  | ANJIR PASAR | BARUNAI BARU           |
| 4  | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT BARU I   |
| 5  | ANJIR MUARA | PATIH MUHUR BARU       |
| 6  | ANJIR MUARA | SUNGAI PUNGGU BARU     |
| 7  | BELAWANG    | MURUNG KERAMAT         |
| 8  | BELAWANG    | SUNGAI SELUANG         |
| 9  | BELAWANG    | PATIH SELERA           |
| 10 | BELAWANG    | KARANG BUAH            |
| 11 | BELAWANG    | BINAAN BARU            |
| 12 | BELAWANG    | RANGGA SURYA           |
| 13 | BELAWANG    | PARIMATA               |
| 14 | JEJANGKIT   | SAMPURNA               |
| 15 | JEJANGKIT   | JEJANGKIT MUARA        |
| 16 | MARABAHAN   | ANTAR BARU             |
| 17 | MARABAHAN   | ANTAR JAYA             |
| 18 | MARABAHAN   | SIDO MAKMUR            |
| 19 | MARABAHAN   | ANTAR RAYA             |
| 20 | TABUKAN     | RANTAU BAMBAN          |
| 21 | TABUKAN     | TAMBA JAYA             |
| 22 | TABUKAN     | MUARA PULAU            |
| 23 | TABUKAN     | BANDAR KARYA           |
| 24 | WANARAYA    | KOLAM KIRI             |

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI



Lampiran III  
Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 5 Tahun 2025  
Tanggal 19 Februari 2026

**DESA PENGAJUAN DD DAN ADD TERCEPAT SERTA KINERJA PERTANGGUNGJAWABAN**

| NO | KECAMATAN   | DESA             | PREDIKAT        |
|----|-------------|------------------|-----------------|
| 1  | MANDASTANA  | PUNTIK LUAR      | TERBAIK PERTAMA |
| 2  | ANJIR PASAR | ANDAMAN II       | TERBAIK KEDUA   |
| 3  | WANARAYA    | SUMBER RAHAYU    | TERBAIK KETIGA  |
|    |             |                  |                 |
| 1  | ALALAK      | BELANDEAN        | HARAPAN I       |
| 2  | ANJIR PASAR | ANDAMAN          | HARAPAN II      |
| 3  | MANDASTANA  | PANTAI HAMBAWANG | HARAPAN III     |

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI